



18 Ribu Siswa di Kota Peroleh Discount Biaya SPP

YOGYA, TRIBUN - Penetapan APBD Perubahan 2013 berpengaruh pada biaya SPP yang harus dibayar siswa SMA dan SMK Negeri di Kota Yogyakarta. Terhitung sejak November November 2013, setiap siswa SMA dibebani Rp 80 ribu per bulan sedangkan siswa SMK Rp 40 ribu. Penurunan biaya SPP ini lantaran ada peningkatan pos anggaran pada alokasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Sebelumnya, BOP siswa SMA Rp 900 ribu per tahun per siswa dan SMK Rp 1,2 juta per tahun per siswa. Pada hitungan tersebut, biaya SPP siswa SMA maksimal Rp 170 ribu per bulan dan SMK Rp 100 ribu per bulan.

Sedangkan untuk November dan Desember 2013, alokasi BOP SMA naik menjadi Rp 1,24 juta per tahun



TRIBUN JOGJA/HENDRA KRISDIANTO

BIAYA SPP. Puluhan siswa SMA mengikuti Olimpiade Akuntansi di USD, beberapa waktu lalu. 18 ribu siswa SMA di Yogya memperoleh pengurangan biaya SPP dari APBD Perubahan.

per siswa dan SMK menjadi Rp 1,4 juta per tahun per siswa.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta-

ta, Drs Edy Heri Suasana, biaya SPP Rp 80 ribu untuk siswa SMA dan Rp 40 ribu

■ Bersambung ke Hal 14

18 Ribu

Sambungan Hal 13

untuk siswa SMK tersebut sudah sangat murah. "Saya rasa biaya itu sudah murah sekali," katanya saat menggelar jumpa pers di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rabu (27/11).

Menurutnya, perhitungan biaya SPP tersebut sudah mengikutsertakan dana bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi DIY.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut sudah berjalan dan dinikmati oleh sekitar 18 ribu siswa SMA dan SMK Negeri di Kota Yogyakarta.

Untuk sekolah swasta, ia mengatakan akan sangat mungkin ke depan juga mendapat kebijakan serupa,

meskipun tidak ia rinci kapan tepatnya. "Sekolah swasta masih kami bantu lewat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Swasta yang juga berasal dari APBD.

Sementara untuk biaya investasi terutama peningkatan kualitas SDM di sekolah, Edy menjelaskan, masih menggunakan kontribusi orangtua murid melalui proses musyawarah. "Misalnya untuk mengirim siswa mengikuti olimpiade pendidikan, tidak bisa menggunakan anggaran untuk operasional," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan

Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan, biaya pendidikan tersebut terhitung paling murah dibanding daerah-daerah lain di sekitar Yogyakarta. "Yogyakarta dipandang sebagai kota pelajar, sehingga pengelolaan pendidikan harus dilakukan secermat mungkin," katanya.

Ia mengatakan, pemungutan biaya SPP, meskipun terbilang rendah, merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap warga yang mampu secara finansial. Dengan tetap membayar SPP, tidak digratiskan, warga yang mampu dapat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di sekolah. (nbi)

kota tersebut dinyatakan berlaku, sudah ada empat investor yang memasukkan berkas lengkap untuk permohonan IMB hotel baru. Kami akan memastikan kelengkapan berkas dan cek lapangan sebelum mengeluarkan izinnya," katanya.

Setiyono mengatakan, bagi investor yang sudah menyerahkan berkas permohonan izin secara lengkap akan memperoleh tanda terima pendaftaran izin, sedangkan investor yang belum bisa melengkapi berkas tidak akan memperoleh tanda terima tersebut.

"Berkas permohonan pun akan kami tolak dan dikembalikan ke investor untuk diperbaiki. Kami memiliki standar pelayanan penerbitan izin hotel maksimal 17 hari. Oleh karena itu, kami hanya memproses berkas yang sudah lengkap," katanya.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin pendirian hotel baru adalah analisis lingkungan, yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Izin yang sudah diproses juga masih dimungkinkan ditolak apabila tidak sesuai aturan seperti "siteplan" dan gambar teknis tidak sesuai.

Selain keempat investor yang sudah menyampaikan berkas permohonan, Dinas Perizinan juga menerima 22 investor lain yang baru menyampaikan rencana untuk mengajukan izin pembangunan hotel baru.

Di Kota Yogyakarta sudah ada 37 hotel berbintang dan sekitar 370 hotel nonbintang, serta beberapa hotel yang kini masih dalam proses pembangunan. (ant/dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005